

## **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN KERJA DI PUSKESMAS SONDER KABUPATEN MINAHASA**

Wulan Fayren Mongilala\*, Paul. A. T. Kawatu\*, Grace. E. C. Korompis\*

\*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi

### **ABSTRAK**

Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang diterapkan di Puskesmas karena dapat melindungi pekerja formal maupun informal dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Puskesmas Sonder merupakan puskesmas yang belum memiliki program kesehatan kerja tetapi lebih mengutamakan pada program upaya kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kesehatan kerja di puskesmas Sonder. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan oktober- November 2018 di puskesmas Sonder melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan pemerintah tentang Pos UKK yaitu permenkes 100 Tahun 2015 tetapi belum berjalan secara maksimal. Sesuai dengan kebijakan yang disepakati untuk program kesehatan kerja ini, diambil dari upaya kesehatan masyarakat dimana lebih difokuskan pada pekerja informal saja. Kurangnya dukungan pemerintah berupa dana serta sarana prasarana yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kesehatan kerja. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program kesehatan kerja di Puskesmas Sonder belum berjalan dengan baik. Disarankan agar puskesmas lebih aktif lagi dalam hal mempromosikan tentang program kesehatan kerja.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Hambatan, Kesehatan Kerja, Puskesmas, Pekerja Informal

### **ABSTRACT**

occupational health program is something that was applied in Puskesmas because it can protect formal and informal workers from work accident and occupational illness. Puskesmas Sonder is one of the Puskesmas do not have an occupational health program but the priority is public health efforts program. This research aims to find the implementation of occupational health programs in puskesmas Sonder. This research was held from October to November 2018 at puskesmas Sonder work area through observation, document study and indepth interview with 5 informants. The results of this study indicate that there are already government regulations regarding Pos UKK post which is Permenkes RI No. 100 Tahun 2015 but has not been applied maximally. In accordance with the agreed policy for this occupational health program, take of public health efforts which are more focused on informal workers. The lack of government support in the form of funds and facilities that are obstacles in the implementation of occupational health programs. Based on this research, it can be concluded that the occupational health program at the Sonder Health Center has not gone well. It is recommended that the puskesmas be more active in promoting health work programs.

**Keywords:** Implementation, Detention, occupational health, Puskesmas, Informal Workers

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah turut berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan demi derajat kesehatan yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut

meliputi pelayanan kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, keluarga berencana, pelayanan gizi masyarakat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Permenkes RI, 2014).

Perlindungan terhadap pekerja puskesmas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan. Bentuk perlindungan tersebut berupa program-program kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja informal dari kecelakaan akibat kerja serta penyakit akibat kerja. Kesehatan kerja adalah praktek serta spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran dengan tujuan yaitu agar pekerja memiliki derajat kesehatan yang tinggi baik fisik, mental maupun sosial melalui usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja maupun terhadap penyakit-penyakit umum (Suma'mur, 2009).

Gangguan kesehatan seperti penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja sering terjadi pada pekerja informal di Indonesia. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan yang paling banyak dialami oleh para pekerja informal seperti tukang kayu. Selain itu terpotongnya jari saat memakai alat potong kayu juga merupakan salah satu ancaman bagi mereka. Oleh karena itu pemerintah menyediakan puskesmas untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan tersebut. Pusat pengembangan kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan pihak yang berperan untuk memberikan

pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat yang masuk dalam wilayah kerjanya dengan berbagai bentuk kegiatan pokok. Dalam hal upaya kesehatan masyarakat tugas pokok Puskesmas yaitu pengadaan Pos UKK, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Promosi Kesehatan, (Efendi dan Makhfudli 2009)..

Puskesmas Sonder merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Minahasa tepatnya di desa Kauneran Kecamatan Sonder yang menjadi alternatif yang dipilih oleh masyarakat sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama. Puskesmas Sonder adalah Puskesmas yang bergerak di 10 desa, selain itu Puskesmas Sonder sudah memiliki program upaya kesehatan seperti Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Pelayanan Gizi dan Pelayanan Pencegahan dan pengendalian penyakit. Melalui observasi dan diskusi awal dengan salah satu tenaga kerja di Puskesmas Sonder bahwa program kesehatan sudah dilakukan bahkan sudah ada data yang tercantum tetapi ada juga program yang belum berjalan dengan baik yaitu program kesehatan kerja dimana hanya petugas kesehatan yang memiliki inisiatif untuk

mengecek kesehatan pekerja setiap bulan terutama pekerja informal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan Program Kesehatan Kerja di Puskesmas Sonder Kabupaten Minahasa.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. penelitian dilakukan di puskesmas Sonder pada bulan September sampai November 2018. Pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara kepada 5 informan yaitu fasilitator STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Kepala Puskesmas Sonder, Pemegang Program, Pemegang Promosi Kesehatan dan seorang pekerja informal.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja**

Pelayanan Kesehatan Masyarakat berupa kegiatan kesehatan kerja merupakan suatu program yang sudah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sonder. Kebijakan di berikan pihak puskesmas berupa program kesehatan kerja yang berdasarkan dari upaya kesehatan masyarakat, dan lebih mengutamakan pada pekerja informal, berupa pengendalian dan pencegahan penyakit akibat kerja dan promosi kesehatan.

Penyusunan Program Promotif dan Preventif serta Sasarannya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan dan didapatkan bahwa dalam pelaksanaan program ini pihak puskesmas telah melakukan penyusunan program pelayanan kesehatan secara umum, tetapi untuk program kesehatan kerja puskesmas hanya melakukan penyusunan berupa pelayanan promotif dan pelayanan preventif. Adapun sasarannya adalah pihak Puskesmas dapat mengontrol kesehatan para pekerja melalui laporan bulanan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap manusia berhak wajib turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Menurut permenkes no. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dimana Puskesmas memiliki peran sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih memperhatikan kesehatannya. Menurut penelitian Chandra, dkk (2017) tentang Analisis Pelaksanaan Program Pos Upaya Kesehatan Kerja di Tempat Pelelangan Ikan Tumumpa di Wilayah Kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado didapatkan bahwa program promotif, preventif serta pelayanan kuratif

sederhana harus dilakukan oleh para kader dari Pos UKK agar rencana yang sudah dibuat saat pembentukan Pos UKK dapat berjalan sesuai rencana.

Adapun beberapa program puskesmas yang sudah berhasil dilaksanakan, tetapi ada beberapa program kesehatan kerja belum berjalan dengan baik dan hanya didasari lewat program upaya kesehatan masyarakat. Program tersebut merupakan pemberdayaan untuk pekerja informal yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Pelayan promotif yaitu berupa penyuluhan kesehatan tentang gangguan kesehatan ditempat kerja yang dilakukan oleh beberapa tenaga kerja dari Puskesmas terhadap pekerja informal sedangkan pelayanan preventif yaitu pembagian alat pelindung diri (APD) berupa masker pada pekerja informal tukang kayu dengan tujuan agar pada saat melakukan pekerjaan mereka tidak mudah terhirup debu kayu. Monitoring yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dilakukan langsung oleh tenaga kerja yang mengelola program tersebut, dan untuk monitoring dari pihak puskesmas telah dilakukan setiap bulan oleh tenaga medis yang bertugas. Untuk evaluasi dalam pelaksanaan tugas tergolong baik karena

petugas mampu melakukan tugasnya. Adapun hambatan dari pelaksanaan program kesehatan kerja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya dilingkungan kerja serta tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri saat melakukan pekerjaan bahkan ada beberapa pekerja tidak menggunakan APD misalnya penutup hidung saat melakukan pengecatan alat meubel sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan, kemudian kurangnya sumber dana di desa untuk pengadaan program kesehatan kerja sehingga mempengaruhi program tersebut, selanjutnya belum ada kerjasama antara pemerintah dan pihak puskesmas tentang kegiatan pembentukan Pos UKK bagi pekerja informal, Menurut hasil penelitian dari Pani, dkk (2012) bahwa dana BOK sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional puskesmas terlebih dalam kegiatan program kesehatan kerja berupa pelayanan promotif dan preventif. Jika dana BOK terlambat dalam pencairan, mereka mengatasinya dengan sistem pinjam dan hutang sehingga kegiatan promotif dan preventif bisa berjalan. Kurangnya sarana dan prasarana untuk program kesehatan kerja terlebih tidak ada penyediaan lokasi untuk Pos UKK sangat berpengaruh dalam program ini, bahkan untuk mengumpulkan masyarakat pada saat penyuluhan cukup

sulit dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dari pelaksanaan penelitian Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja di Puskesmas Sonder, disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan program kesehatan kerja di Puskesmas Sonder berupa upaya kesehatan masyarakat berjalan dengan baik. Secara keseluruhan program upaya kesehatan masyarakat berjalan dengan baik yaitu pelayanan KIA&KB, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular terlebih pada pekerja informal. Pelayanan Promotif dan Preventif untuk pelaksanaan program kesehatan kerja yang dilakukan berupa penyuluhan kesehatan yang dihadiri masyarakat sekitar dan pembagian Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker untuk pekerja informal tukang kayu.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja dalam Pembentukan Pos UKK yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah desa tentang program kesehatan kerja sehingga sulit menjalin kerjasama, tidak tersedianya sarana dan prasarana dalam pembuatan Pos UKK,

sumber dana yang kurang baik dari puskesmas dan desa serta tenaga kerja dalam bidang K3 masih kurang

### **SARAN**

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa  
Diharapkan lebih meningkatkan kualitas SDM serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan tenaga kesehatan seperti pelatihan K3 agar pelayanan promotif dan preventif lebih maksimal. Melakukan juga pengawasan yang rutin terhadap kegiatan promotif dan preventif di setiap Puskesmas.
2. Bagi Puskesmas Sonder  
Sebaiknya Kepala Puskesmas melakukan sosialisasi tentang peraturan undang-undang kesehatan, terlebih khusus mengenai Program Kesehatan Kerja dikarenakan pengetahuan yang dimiliki tenaga kesehatan masih kurang, dan untuk kader atau tenaga medis lainnya disarankan untuk mengikuti pelatihan K3 terlebih dahulu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonimous. 2006. *Pos Upaya Kesehatan Kerja*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Chandra, W. W., Kawatu, P. A. T., Boki, H. B. 2017. Analisis Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja di tempat Pelelangan Ikan Tumumpa di Wilayah Kerja Puskesmas Tuminting Kota Manado. (*KESMAS*) *Kesehatan Masyarakat*. (Online) vol. 6, no.5. (<http://www.ejournalhealth.com/index.php/kesmas/article/view/658> diakses pada 10 Juli 2018).
- Effendi dan Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- ILO. 2013. *Health and Safety In Work Place for Productivity*. Geneva: International Labour Office.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Sucipto. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gasyen Publisng.
- Suma'mur. 2009. *Hiegine Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: CV. Sagung Seto.